

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan para pihak eksternal maupun internal, yang meliputi pemegang saham, pemerintah, masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, internasional, lembaga diluar perusahaan, dan lainnya yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi serta berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan (Hadi, 2014). *Stakeholder* mempunyai hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi berkaitan dengan keuangan dan non keuangan. Adapun salah satu informasi non keuangan adalah pengungkapan sosial perusahaan. Robert dalam (Nur dan Priantinah, 2012) mengatakan bahwa pengungkapan sosial perusahaan merupakan kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan hubungannya dengan *stakeholder* mereka, dengan adanya teori *stakeholder* ini, tentunya memberikan manfaat bagi para *stakeholder*-nya. Penerapan program tanggung jawab sosial oleh perusahaan merupakan salah satu manfaat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan masyarakat dikawasan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* memiliki hak dan wewenang untuk mendapatkan akses atas informasi keuangan dan non keuangan perusahaan terutama informasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Shocker & Sethi (1974) menyatakan bahwa semua organisasi baik sosial, politik, maupun bisnis yang dijalankan dalam suatu masyarakat, tanpa terkecuali akan terikat kontrak sosial. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat saling mengikat dan ketergantungan. Keberhasilan kegiatan usaha

perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan selera masyarakat, pada saat yang sama harus mampu mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang dilayani. Apabila kontrak sosial tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan, tentunya akan memberikan dampak negatif. Perusahaan akan kesulitan untuk mendapatkan sumber daya, menyebabkan kenaikan biaya modal, penurunan harga saham, aturan pemerintah yang semakin ketat, dan bahkan mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan (Naubert & Fink, 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas, teori legitimasi ini akan memberikan landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik dimasyarakat dan dilingkungan tempat perusahaan beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melaksanakan program tanggung jawab sosial yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif kepada masyarakat, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik tanpa adanya penolakan maupun permasalahan dari masyarakat.

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan hubungan yang dijalin antara dua belah pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai agent (karyawan) dan pihak yang lain bertindak sebagai *principal* atau pemilik perusahaan (Hendriksen dan Van Breda dalam Aziz, 2014). Teori keagenan ini berguna untuk memahami tentang tata kelola perusahaan. Dalam mengelola perusahaan, diperlukan tenaga profesional yang ahli dalam bidangnya untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Tujuannya agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik, serta memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya yang minimal. Tenaga profesional tersebut, bekerja untuk kepentingan perusahaan serta memiliki tupoksi dan kebebasan dalam menjalankan manajemen perusahaan (Ferial dan Handayani, 2016).

Berkaitan dengan hubungan keagenan, manajer sebagai pihak yang mempunyai akses langsung terhadap informasi apa saja yang disajikan atau diungkapkan oleh perusahaan, mempunyai informasi yang lebih mutakhir

terhadap pihak eksternal perusahaan, misalnya kreditor atau investor. Untuk meminimalisir asimetri informasi tersebut, maka pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan perusahaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku tanpa ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen) pada dasarnya sulit tercipta karena kepentingan yang saling bertentangan dan setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya.

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu pernyataan umum yang mengindikasikan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan guna menyediakan dan memberikan kontribusi kepada *stakeholder* (Purwanto 2011). Sedangkan menurut Gassing, 2016:163 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan. CSR muncul dari dorongan dan permintaan masyarakat atas perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk memaksimalkan laba, mensejahterakan para pemegang saham, dan mengabaikan tanggung jawab sosial atas dampak perusahaan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya (Daniri, 2007).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan yaitu dengan cara memaksimalkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif kegiatan usaha terhadap stakeholder dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit); peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya komunitas sekitar (people); serta lingkungan hidup (planet) (Fitri, 2015:500). Tanggung jawab ini kemudian dilanjutkan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada pihak

terkait melalui pengungkapan CSR. Pengungkapan ini menjadi sinyal positif atas keseriusan manajemen dalam pengembangan perusahaan dimasa depan dan menunjukkan nilai lebih perusahaan atas kepedulian terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas perusahaan (Lindawati, 2015).

2.3 Tata Kelola Perusahaan

2.2.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Agoes, 2011: 101). Konsep ini mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian kegiatan usaha perusahaan untuk menaikkan nilai saham, dan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, dan masyarakat yang memiliki kepentingan dengan perusahaan (Tunggal, 2012:24). Tata kelola perusahaan yang baik dapat memperkuat kontrol, mengurangi perilaku oportunistik serta tingkat asimetri informasi, sehingga hal tersebut mempunyai dampak yang positif pada tingginya kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Li & Qi, 2008).

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa, tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengendalikan perusahaan serta hubungan antara para pemangku kepentingan, dan menguraikan hak-hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan jangka pendek dan panjang dengan cara yang transparan, akuntabel, dan efisien sehingga dapat memberikan kebermanfaatan dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan.

2.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh entitas keuangan yang memiliki kapasitas untuk memobilisasi

sumber daya yang signifikan untuk melakukan pengawasan dan intervensi dalam tata kelola perusahaan (Gillan dan Starks, 2000). Kepemilikan institusional memiliki peran yang efektif sebagai pengawas terhadap operasional perusahaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. Kehadirannya seringkali mendorong perusahaan untuk transparan dalam pelaporan keuangan, mendesak manajemen untuk mengadopsi tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memastikan manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan fungsi dan peran yang dimiliki oleh kepemilikan institusional tentunya memberikan dampak yang positif terhadap usaha perusahaan. Dengan wewenang yang begitu luas membuat investor institusional mempunyai hak untuk mengintervensi kebijakan manajemen yang diduga merugikan perusahaan, hal ini tentunya akan mengurangi biaya keagenan. Selain itu, mayoritas investor institusional memiliki pandangan untuk fokus pada investasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar jangka pendek sehingga dapat menjaga stabilitas harga saham perusahaan dan berimplikasi juga pada nilai perusahaan secara keseluruhan.

2.2.3 Komite Audit

Komite audit merupakan kumpulan orang yang ditunjuk oleh kelompok yang memiliki kuasa lebih besar dan tinggi, yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan tugas-tugas khusus dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Perusahaan, atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 2014). Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang BUMN pasal 71 bahwa “komite audit adalah Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dewan pengawas untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas yang bertugas menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) maupun auditor eksternal, memberikan rekomendasi dan tindak lanjut terkait penyempurnaan sistem pengendalian

manajemen dan pelaksanaannya, memastikan telah melaksanakan prosedur review untuk mengetahui segala informasi penting yang memerlukan perhatian dewan komisaris dan dewan pengawas serta tugas-tugas dewan pengawas lainnya”.

Berdasarkan pernyataan diatas, komite audit berperan penting dalam menciptakan Good Corporate Governance, karena dituntut untuk mencegah adanya manipulasi pelaporan dan mempertahankan independensi komite audit dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi ini juga mendorong komite audit untuk memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance, yang terdiri dari: *fairness, responsibility, accountability, dan transparency* (Lidia dan Bonifasius, 2021). Sebagai pihak yang independen, komite audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, hal ini dibutuhkan agar hasil pekerjaan objektif dan sesuai dengan fakta, sehingga dapat memberikan upaya perbaikan bagi manajemen untuk menjalankan operasi usaha sesuai dengan tata nilai yang seharusnya berlaku.

2.4 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang bentuknya berupa laporan keuangan (Arif dan Yanuar, 2009:6). Sedangkan Brigham dan Houston (2006:44) menyatakan bahwa, laporan keuangan merupakan lembaran-lembaran kertas yang memiliki angka tertulis diatasnya, namun penting juga untuk memperhatikan dan meninjau aset-aset sesungguhnya yang mendasari angka-angka tersebut. Kinerja keuangan merupakan gambaran atas kondisi keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitas keuangan, baik capaian profitabilitas, kondisi likuiditas, dan kecukupan modal serta pemanfaatan semua aset yang dimiliki dalam menghasilkan profit dalam satu tahun periode berjalan.

Adapun cara untuk mengukur kinerja keuangan yakni dengan menganalisa laporan keuangan yang terdiri dari perhitungan laba/rugi dan

neraca. Ukuran yang dipakai dalam melakukan analisa adalah menggunakan analisa rasio keuangan. Terdapat 4 jenis rasio, setiap rasio memiliki fungsi dan perhitungannya masing-masing. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan cara untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dengan sumber daya yang ada (Khasmir 2005). Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran atau gambaran atas tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan, dalam hal ini ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Semakin tinggi laba yang diperoleh dan dihasilkan maka perusahaan tersebut semakin efektif. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan ROA (Return on Asset).

2.4.1 ROA (Return on Asset)

ROA merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada (Arief, 2009:71). Menurut (Fahmi, 2012:98) *return on assets* (ROA) digunakan untuk mengetahui sejauh mana dana yang diinvestasikan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebetulnya merupakan aset perusahaan yang ditanamkan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan serta semakin baik posisi perusahaan dalam segi penggunaan aset.

Rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset Tetap}} \times 100 \%$$

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini dilaksanakan yang memiliki kaitan erat dengan pengaruh tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
1.	Mulyasari (2017), Pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan (Studi pada perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015).	GCG, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, ROA	1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 3. Komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. 4. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 5. Terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap kinerja keuangan.
2.	Andika (2018), Pengaruh penerapan GCG terhadap Kinerja Keuangan (Studi kasus pada perusahaan	GCG, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan	1. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh positif dan tidak

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
	perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016).	Komisaris Independen, Komite Audit dan ROA	sinifikan terhadap kinerja keuangan; 2. Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; 3. Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
3.	Agatha Ajeng (2020), <i>Corporate Sosial Responsibility</i> dan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2016-2017)	CSR, PBV, <i>Debt to equity ratio</i>	1. CSR berpengaruh negatif terhadap Kinerja Perusahaan; 2. <i>Debt to equity ratio</i> sebagai variabel kontrol, memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dalam PBV.
4.	Ika Febrilia P. (2020) Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	CSR, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, ROA	1. Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan; 2. Kepemilikan insitusional tidak berpengaruh

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
	(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)		terhadap kinerja keuangan; 3. Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
5.	Masyfuq Umar S. (2020) Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2016-2018)	CSR, ROA, ROE, ROS, EPS	1. CSR (CSRI) memiliki pengaruh yang Signifikan Terhadap Kinerja Keuangan (ROA, ROE & EPS); 2. CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROS.
6.	Alda Nadya Mastuti (2021) Pengaruh Kepemilikan Intitusional dan Ukuran Dewan Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Profitabilitas	Kepemilikan Institusional, Board Size ROA, PBV	1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan; 2. Variabel board size tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; 3. Variabel profitabilitas tidak mampu memediasi

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
			kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan; 4. Variabel profitabilitas tidak mampu memediasi board size terhadap nilai perusahaan.
7.	Irfan Herdiansyah (2021) “Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan Tata Kelola Perusahaan (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Mediasi“ (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019”	CSR, GCG, Manajemen Laba, ROA, EPS, dan Tobin’s Q	1. CSR perusahaan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan; 2. GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan; 3. CSR Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba; 4. GCG Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba; 5. Manajemen Laba Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan.
8.	Anthony Holly (2021) Pengaruh Kepemilikan	Kepemilikan Manajerial,	1. Kepemilikan manajerial

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
	Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional, Manajemen Laba, Kinerja Keuangan	berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan; 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan; 3. Manajemen laba berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.
9.	Dwi Urip Wardoyo (2024) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan	Kepemilikan Institusional, ROA, DER	1. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berdampak signifikan pada nilai perusahaan; 2. Profitabilitas berdampak positif yang signifikan pada nilai perusahaan secara parsial; 3. Struktur modal secara parsial tidak berdampak signifikan

No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
			pada nilai perusahaan.
10.	Ghadiazka Azzata Munir (2024) Pengaruh Komite Audit dan Audit Eksternal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Finansial dan non-Finansial dalam Indeks LQ43 tahun 2019-2021)	Komite Audit (Ukuran Komite Audit dan Frekuensi Rapat Komite Audit) dan Kualitas Audit Eksternal (Reputasi KAP dan Independensi Auditor)	1. Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan; 2. Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan; 3. Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan; 4. Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
11.	Winda Anastasya Butar Butar (2024) Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar	CSR, ROA, ROE, EPS	1. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA; 2. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE; 3. CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap EPS.

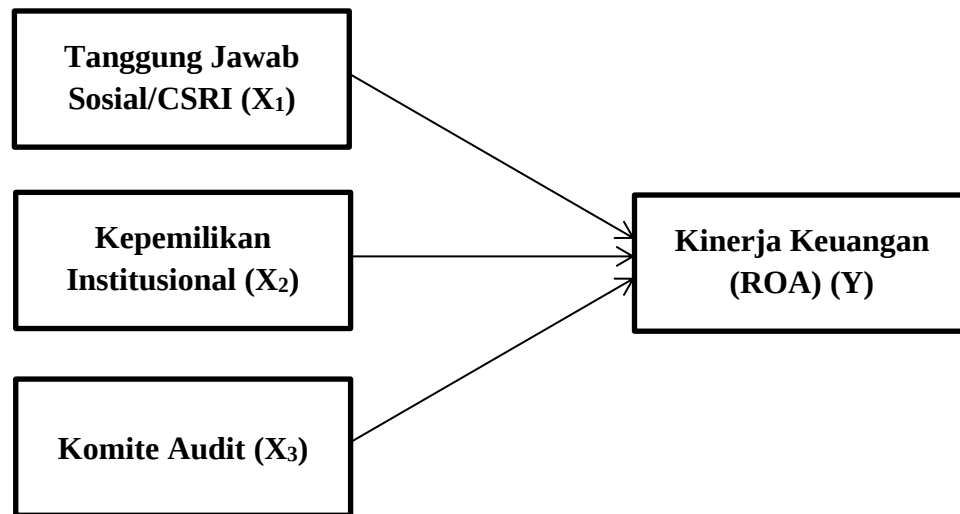
No	Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil
	di Bursa Efek Indonesia Periode 2020 – 2022)		
12.	Siti Khopipah (2024) Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 -2022)	CSR, ROA, Ukuran Perusahaan	1. CSR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA; 2. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap ROA; 3. CSR dan ukuran perusahaan secara simultan mempengaruhi ROA.
13.	Irvan Maksani (2024) Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Keuangan Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022	Komite Audit, Kinerja Keuangan,	1. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan;

Sumber: Data diolah (2025)

2.6 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori diatas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka konsep yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan ialah sebagai berikut:

Gambar 1 Konseptual Penelitian



Sumber: Data diolah (2025)

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Tanggung Jawab Sosial terhadap Kinerja Keuangan

Menurut (Irfan, 2019; Winda, 2024; Siti, 2024) bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, utamanya atas produk yang dihasilkan. Semakin banyak produk yang terjual, tentunya akan berimplikasi pada peningkatan penjualan dan laba yang dicerminkan pada *Return On Asset* (ROA) perusahaan. Secara tidak langsung CSR menjadi salah satu media yang efektif untuk pemasaran produk dan pencitraan perusahaan. Semakin tersebar informasi positif perusahaan, tentunya akan menarik minat *stakeholder* dan *shareholder* untuk berinvestasi. Biasanya, perusahaan yang semakin tinggi dalam mengungkapkan CSRnya cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang sedikit mengungkapkan CSR.

Pelaksanaan program CSR yang baik dan bijak oleh perusahaan terbukti dapat meningkatkan pamor, sehingga dapat meningkatkan hubungan dengan para pihak baik masyarakat, bank, investor, ataupun lembaga pemerintahan, dari hubungan tersebut tercermin pada keuntungan ekonomi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.7.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Yusmaniarti, 2021 dalam Dwi, 2024 bahwa Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dipegang oleh entitas keuangan yang memiliki kapasitas untuk mengatur, mengontrol dan mempengaruhi sumber daya yang besar dalam melaksanakan pengawasan dan intervensi terhadap kinerja manajemen perusahaan. Dengan besarnya otoritas yang dimiliki, tentunya akan meminimalisir tindakan fraud didalam perusahaan dan memastikan agen (manajer) bertindak sesuai dengan kepentingan principal (pemegang saham). Apabila kepentingan agen dan principal terjalin dengan baik, tentunya akan menarik minat investor untuk berinvestasi kepada perusahaan dan berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.7.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Tugas komite audit adalah melaksanakan pengawasan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, memeriksa kualitas dan keandalan laporan keuangan, turut mengawasi pelaksanaan audit eksternal, dan melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit membantu mengurangi disinformasi melalui peran pengawasannya, semakin besar ukuran komite, semakin efektif dalam mengatasi masalah terkait dengan pengungkapan keuangan perusahaan (Ghadiazka, 2024).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.